

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 1 dan ayat 2). Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui pemilu akan terwujud suatu mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan mendapat pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta pergantian pemerintahan secara teratur. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), menyatakan secara tegas bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak setara dalam segala bentuk kehidupan di masyarakat, termasuk dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bahwa “pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang merupakan suatu tanda bukti adanya kehidupan politik yang demokratis. Pemilu bertujuan agar rakyat dapat menentukan secara langsung siapa yang akan menjadi pimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang akan membawa perubahan bagi rakyat untuk masa depannya.

Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislatif di pemerintahan atau memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang bertujuan untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatan pemilu, partisipasi dari rakyat sangat dibutuhkan dalam menentukan siapa saja yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakil daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat.

Menurut Syarbaini (2004 : 74) sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Faktanya, sosialisasi politik dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Padang Bolak belum begitu optimal. Partisipasi politik yang ada di suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara atau pemerintahan yang ada. Demokrasi

tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik.

Adapun masalah yang terdapat di dalam partisipasi politik masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Padang Lawas Utara Tahun 2013 yaitu masih adanya terdapat masyarakat yang kurang memahami apa sebenarnya makna dari ikut serta dalam diskusi politik, dan juga banyak masyarakat yang tidak mau untuk ikut dalam diskusi politik, dikarenakan juga masyarakat Desa Gunung Tua Tonga masih banyak yang belum paham tentang guna dan manfaat dari diskusi politik sebelum pilkada dilaksanakan.

Dalam hal pemberian suara, masyarakat Desa Gunung Tua Tonga juga masih banyak partisipasinya yang pasif untuk memberikan hak suaranya pada saat Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2013, dikarenakan berbagai alasan atau faktor yang menyebabkan warga masyarakat Desa Gunung Tua Tonga tidak memilih atau memberikan hak suaranya pada Pilkada yang telah berlangsung yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kampanye dan sosialisasi yang telah diadakan oleh para calon Bupati/Wakil Bupati.

Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada saat Pilkada Bupati/Wakil Bupati di Desa Gunung Tua Tonga laki-laki untuk setiap TPS, TPS I sebanyak 168, TPS II sebanyak 243, TPS III sebanyak 256, jumlah semuanya sebanyak 667. Jumlah daftar pemilih tetap perempuan (DPT) pada saat Pilkada Bupati/Wakil Bupati di Desa Gunung Tua Tonga dalam setiap TPS, TPS I sebanyak 217, TPS II

sebanyak 162, dan TPS III sebanyak 204, jumlah semuanya sebanyak 583. Maka jumlah keseluruhan antara perempuan dan laki-laki sebanyak 1.250.

Adapun data dari KPU Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 yang menggunakan hak suara pada saat Pilkada untuk Kecamatan Batang Onang laki-laki sebanyak 3.387 dan perempuan sebanyak 3600. Kecamatan Dolok laki-laki sebanyak 6.381 dan perempuan sebanyak 6.417. Kecamatan Dolok Sigompulon laki-laki sebanyak 4.011 dan perempuan sebanyak 4.220. Kecamatan Halongonan laki-laki sebanyak 7.807 dan perempuan sebanyak 8.763. Kecamatan Hulu Sihapas laki-laki sebanyak 1.180 dan perempuan sebanyak 1.159. Kecamatan Padang Bolak laki-laki sebanyak 16.350 dan perempuan sebanyak 16.918. Kecamatan Padang Bolak Julu laki-laki sebanyak 2.777 dan perempuan sebanyak 3.055. Kecamatan Portibi laki-laki sebanyak 6.564 dan perempuan sebanyak 6.481. Kecamatan Simangambat laki-laki sebanyak 12.995 dan perempuan sebanyak 12.318.

Dalam pemberian suara, adanya kampanye politik memudahkan para calon Bupati/Wakil Bupati untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengungkapkan visi dan misinya ketika sudah terpilih jadi Bupati/Wakil Bupati. Dalam kegiatan politik inilah banyak terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh para calon Bupati, seperti memberikan uang kepada masyarakat Desa Gunung Tua Tonga agar ia terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini menyebabkan pada saat kampanye politik, sosialisasi dan pemilihan, partisipasi politiknya masih rendah.

Menurut Sitepu (2012 : 92) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun secara kelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi.

Dengan demikian partisipasi politik dari rakyat sangatlah berpengaruh besar terhadap berlangsungnya suatu pemilihan umum pada penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013, secara langsung dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya serta yang akan menjadi perwakilan bagi rakyat yang mampu untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan yang diharapkan masyarakat Desa Gunung Tua Tonga.

Secara nyata di negara Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2013. Sama halnya dengan Kecamatan-Kecamatan dan Kabupaten-Kabupaten lainnya bahwa di Kabupaten Padang Lawas Utara juga melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018. Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga adalah suatu masyarakat yang sudah sering mengikuti pelaksanaan pemilihan umum, dalam melaksanakan pemilihan umum khususnya masyarakat Desa Gunung Tua Tonga di Kecamatan Padang Bolak ini masih pasif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati Di Padang Lawas Utara Tahun 2013”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya partisipasi politik masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ikut diskusi politik pada Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.
3. Masih banyaknya masyarakat Desa Gunung Tua Tonga yang tidak memberikan hak suaranya/tidak ikut memilih pada Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Kurangnya partisipasi politik masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.

2. Masih banyaknya masyarakat Desa Gunung Tua Tonga yang tidak memberikan hak suaranya/tidak ikut memilih pada Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Padang Lawas Utara tahun 2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan haruslah memiliki tujuan tertentu untuk mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara tahun 2013.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.

2. Sebagai referensi dan bahan masukan bagi mahasiswa lain dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi dalam mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Padang Lawas Utara Tahun 2013.